



RLPPD

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tahun 2021

**Kabupaten
Penajam Paser Utara**



A. Pendahuluan

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Bab IV Pasal 22 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bab IV pada Pasal 21, 22 dan Pasal 23.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan informasi utama keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada publik dengan muatan informasi sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Adapun capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Makro

No	Indikator kinerja makro	Capaian kinerja tahun 2020	Capaian kinerja tahun 2021	perubahan
1	Indeks pembangunan manusia	71,64	71,41	
2	Angka kemiskinan	11930	12130	
3	Angka pengangguran	5104	2365	
4	Pertumbuhan ekonomi	2,61	2,34	
5	Pendapatan per kapita	9052,13	9141,6	
6	Ketimpangan pendapatan	0,292	0,263	

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021

a. Indeks Pembangunan Manusia

Sebagai gambaran tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah, direpresentasikan melalui sejumlah indikator penyusun yang menghasilkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan capaian pada tahun 2021 IPM

Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 71,41 atau mengalami penurunan sebesar -0,321 % dibanding tahun 2020 yang mencapai 74,46.

b. Angka Kemiskinan

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Pada tahun 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 12130 atau meningkat sebesar 1676 dibanding tahun 2020 angka kemiskinan mencapai 11930.

c. Angka Pengangguran

Salah satu masalah ketenagakerjaan adalah pengangguran. Penganggur adalah penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, tidak punya pekerjaan tetapi tidak mencari pekerjaan dengan alasan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Angka Pengangguran Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 sebesar 2.365 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 5.104 artinya data ini menunjukkan adanya penurunan yang signifikan sebesar 53%.

d. Perumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan sebesar 4,33% pada tahun 2021 berbeda arah pertumbuhan dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -4,06%. Hal ini dipengaruhi oleh mulai terkelolanya penularan Covid-19 sehingga dampak ikutannya tidak separah tahun 2020.

e. Pendapatan Per Kapita

Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah adalah PDRB perkapita/Pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Pada

Tahun 2021 nilai PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 9141,6 naik dibanding tahun 2020 sebesar 9052,13.

f. Ketimpangan Pendapatan

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan pemerataan pendapatan dan masalah kemiskinan. Rasio Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Pada tahun 2021 angka Gini Rasio Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,263 menurun dibanding tahun 2020 sebesar 0,292.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Tabel 1.2 Capaian Urusan Pendidikan

No IKK	IKK OUTCOME	RUM US	CAPAIAN
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 2345x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 7210	32,524
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam 2 pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 20356 ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 22155	91,88
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam 2 pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 6375 ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 10614	60,062
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan 2 pendidikan dasar dan menengah yang; berpartisipasi dalam 3	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan 2 pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di 3 pendidikan kesetaraan	100

	pendidikan kesetaraan	$= 80$ $\frac{\dots}{\dots} \times 100 \%$ <p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan 3 pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan = 80</p>	
--	-----------------------	--	--

b. Urusan Kesehatan

Tabel 1.3 Capaian Urusan Kesehatan

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten}} \times 100 \%$ <p>= 250</p> <p>186801</p>	0,134
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kabupaten}} \times 100 \%$ <p>= 1</p> <p>2</p>	50
1.b.3	Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten}} \times 100 \%$ <p>= 2855</p> <p>2855</p>	100
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten}} \times 100 \%$ <p>= 2886</p> <p>2925</p>	98,667
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten}} \times 100 \%$ <p>= 2847</p> <p>2915</p>	97,66
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di kabupaten}} \times 100 \%$ <p>= 8434</p> <p>12896</p>	65,4

1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 25888 ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten = 30918	83,731
1.b.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 55060 ..x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten = 104425	52,727
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 10713x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten = 17045	62,851
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 6963x 100 % Jumlah penderita hipertensi di kabupaten = 9853	70,669
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2328x 100 % Jumlah penderita DM di kabupaten = 2716	85,714
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 168 ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di kabupaten = 177	94,915
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 132x 100 % Jumlah penderita TBC di kabupaten = 132	100
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan	100

	mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<p>pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 3626</p> <p>----- x</p> <p>100 %</p> <p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten = 3626</p>	
--	---	--	--

c. Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 1.4 Capaian Urusan Pekerjaan Umum

No IKK	IKK OUTCOME	RUM US	CAPAI AN
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	<p>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) = 220</p> <p>----- x 100</p> <p>% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) = 1523</p>	14,445
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	<p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) = 4609</p> <p>----- x</p> <p>100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (m) = 11100</p>	41,523
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	<p>Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 1,82</p> <p>----- x 100</p> <p>% Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten = 4308,57</p>	0,042
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	<p>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten. = 40802</p> <p>----- x</p>	100

		100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut. = 40802	
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 1306x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten A = 53376	2,447
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 604x 100 % Jumlah IMB yang berlaku = 604	100
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 910,98 Jumlah total panjang jalan kabupaten = 1241,29	73,39
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 35.x 100 % Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten = 270	12,963
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 0x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 0	0

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 1.5 Capaian Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 22 ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 22	100
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 20. ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 81	24,69
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 0 ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 0	0
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 2556. ----- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 53376	4,789
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 26 ----- x 100 % Jumlah unit rumah kab/kota = 26	100

e. Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Tabel 1.6 Capaian Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No IKK	IKK OUTCOME	RUM US	CAPAI AN
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 35. ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 35	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 10 ----- x 100 % Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 17	58,82
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	9488
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	38320
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 6591 ----- x 100 % Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan = 0	659100
1.e.6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 41 ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 41	100
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	15

f. Urusan Sosial

Tabel 1.7 Capaian Urusan Sosial

No IKK	IKK OUTCOME	RUM US	CAPAI AN
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti =	67,89

	terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	1146 ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 1688	
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota;	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 2259. ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 2259	100

3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap LPPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 belum diterbitkan dari Kementerian Dalam Negeri terkait Skor hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga belum bisa disajikan dalam bentuk nilai capaian.

Adapun Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 sama seperti tahun sebelumnya yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapantan Daerah, kemudian ditegaskan di ayat 2 bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, melalui Pemerintah Daerah.

Berdasarkan rujukan ketentuan perundangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan dokumen operasional Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mencapai target-target kinerja yang ditetapkan. Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020. Didalam perjalanan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 ini tidak bisa kita pungkiri bahwa perubahan-perubahan kebijakan baik pendapatan, Dana Alokasi Umum (DAU) dana alokasi khusus dan asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta beberapa program dan kegiatan yang digulirkan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara membawa konsekuensi adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan pada Pasal 161 Ayat (2) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dilaksanakan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, seperti Bencana Non Alam berupa mewabahnya Virus Covid-19.

Faktor yang sangat mempengaruhi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 yaitu dengan terjadinya bencana non alam berupa mewabahnya penularan Virus Covid -19 di Indonesia yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Sebagai Bencana Nasional.

Penetapan Penyebaran Covid - 19 sebagai Bencana Nasional diikuti dengan diterbitkannya kebijakan tentang refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka pembiayaan Percepatan Penanganan Pandemi Covid - 19 di Kabupaten Penajam Paser Utara. Beberapa kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Pusat terkait dengan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/KMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tabel 1 Realisasi APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021

Nomor Urut	Uraian	Ref	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	2020
1	2		3	4	5	6
1	PENDAPATAN	5.2.1	1.901.444.220.132,00	1.222.723.310.615,79	64,30%	1.329.210.020.255,99
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.2.1.1				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.2.1.1.1	52.107.703.388,00	25.627.497.245,00	49,18%	22.807.535.557,97
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.2.1.1.2	13.432.294.020,00	6.726.318.073,00	50,08%	10.617.471.344,25
1.1.3	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.2.1.1.3	18.078.067.000,00	2.487.623.482,61	13,76%	2.318.899.829,43
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.2.1.1.4	64.369.834.329,00	53.050.724.615,74	82,42%	52.391.100.512,61
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		147.987.898.737,00	87.892.163.416,35	59,39%	88.135.007.244,26
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.2.1.2				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.2.1.2.1				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	5.2.1.2.1.1	981.077.174.821,00	390.052.289.418,00	39,76%	546.298.177.702,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	5.2.1.2.1.2	280.388.087.000,00	271.407.999.000,00	96,80%	275.868.751.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.2.1.2.1.3	77.268.475.000,00	75.661.142.165,00	97,92%	43.214.328.612,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.2.1.2.1.4	63.849.814.000,00	51.984.325.602,00	81,42%	62.563.893.490,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.402.583.550.821,00	789.105.756.185,00	56,26%	927.945.150.804,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.2.1.2.2				
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	5.2.1.2.2.1	55.643.691.000,00	55.643.691.000,00		27.240.345.000,00
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
1.2.2.3	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
1.2.2.4	Dana Desa	5.2.1.2.2.2	38.775.111.000,00	38.775.111.000,00		36.490.369.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya		94.418.802.000,00	94.418.802.000,00	100,00%	63.730.714.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.2.1.2.3				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.2.1.2.3.1	99.310.832.050,00	110.646.308.391,00	111,41%	84.662.542.089,00
1.2.3.3	Bantuan Keuangan	5.2.1.2.3.2	110.996.484.000,00	110.996.484.000,00	100,00%	115.760.002.756,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		210.307.316.050,00	221.642.792.391,00	105,39%	200.422.544.845,00
	Total Pendapatan Transfer		1.707.309.668.871,00	1.105.167.350.576,00	64,73%	1.192.098.409.649,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.2.1.3				
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.2.1.3.1	18.582.140.000,00	2.661.500.000,00	14,32%	48.976.603.362,73
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya		27.564.512.524,00	27.002.296.623,44	97,96%	-
	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		46.146.652.524,00	29.663.796.623,44	64,28%	48.976.603.362,73

	Jumlah Pendapatan		1.901.444.220.132,00	1.222.723.310.615,79	64,30%	1.329.210.020.255,99
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI	5.2.2.1				
2.1.1	Belanja Pegawai	5.2.2.1.1	511.203.026.470,00	380.071.503.726,00	74,35%	519.277.167.778,00
2.1.2	Belanja Barang	5.2.2.1.2	694.444.692.377,00	382.521.030.936,26	55,08%	290.481.608.692,81
2.1.3	Belanja Bunga	5.2.2.1.3	21.663.420.907,00	16.637.316.584,00	76,80%	10.784.834.528,00
2.1.4	Belanja Subsidi		-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	5.2.2.1.4	41.573.108.650,00	8.375.936.894,00	20,15%	30.245.333.900,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.2.2.1.5	3.145.600.000,00	2.692.443.365,00	85,59%	1.088.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi		1.272.029.848.404,00	790.298.231.505,26	62,13%	851.876.944.898,81
2.2	BELANJA MODAL	5.2.2.2				
2.2.1	Belanja Tanah	5.2.2.2.1	24.594.646.608,00	292.827.035,00	1,19%	6.037.048.468,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.2.2.2	76.207.027.483,00	48.618.407.921,82	63,80%	77.882.221.674,90
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.2.2.3	84.541.603.962,00	29.110.006.350,00	34,43%	99.011.646.613,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.2.2.4	342.687.463.231,00	152.007.787.009,00	44,36%	174.169.216.670,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.2.2.5	5.738.950.538,00	5.355.408.041,00	93,32%	4.240.109.317,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal		533.769.691.822,00	235.384.436.356,82	44,10%	361.340.242.742,90
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.2.2.3	9.599.988.300,00	6.108.404.841,00	63,63%	57.840.705.125,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga		9.599.988.300,00	6.108.404.841,00	63,63%	57.840.705.125,00

Nomor Urut	Uraian	Ref	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	2020
1	2		3	4	5	6
2.4	BELANJA TRANSFER					
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00%	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah/Provinsi		-	-		771.813.476,00
2.4.3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa		121.930.994.839,00	91.521.729.694,00	75,06%	115.521.252.939,00
2.4.4	Belanja Transfer Dana Otonomi - Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota		13.722.064.675,00	-	0,00%	-
	Jumlah Belanja Transfer		140.653.059.514,00	96.521.729.694,00	68,62%	116.293.066.415,00
	Jumlah Belanja		1.956.052.588.040,00	1.128.312.802.397,08	57,68%	1.387.350.959.181,71
	Surplus/ (Defisit)		(54.608.367.908,00)	94.410.508.218,71	#####	(58.140.938.925,72)
3	PEMBIAYAAN	5.2.4				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.2.4.1	155.839.043.548,00	13.216.714.882,40	8,48%	93.192.379.650,12
3.1.1	Penggunaan SILPA	5.2.4.1.1	5.839.043.548,00	13.216.714.882,40	226,35%	93.192.379.650,12
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Pusat		-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Keuangan Bank		150.000.000.000,00	-	0,00%	-
3.1.7	Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.2.4.1.2	-	-	-	-
3.1.8	Penerimaan Pinjaman Daerah-Masyarakat (Obligasi Daerah)		-	-	-	-
3.1.9	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
3.1.10	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan		155.839.043.548,00	13.216.714.882,40	8,48%	93.192.379.650,12
3.2	PENGELUARAN DAERAH	5.2.4.2	101.230.675.640,00	65.948.006.730,00	65,15%	21.834.725.842,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.2.4.2.1	46.100.000.000,00	19.600.000.000,00	42,52%	9.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
3.2.4	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
3.2.5	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	-
3.2.6	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.2.4.2.2	55.130.675.640,00	46.348.006.730,00	84,07%	12.334.725.842,00
3.2.7	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		-	-	-	-
3.2.8	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
3.2.9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran		101.230.675.640,00	65.948.006.730,00	65,15%	21.834.725.842,00
	Pembiayaan Netto	5.2.5	54.608.367.908,00	(52.731.291.847,60)	-96,56%	71.357.653.808,12
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.2.5.1	-	41.679.216.371,11	-	13.216.714.882,40

5. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah merupakan bagian dari kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diharapkan dapat menginisiasi lahirnya ide dan gagasan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan tata kelola pemerintah daerah. Dalam rangka penggalan ide-ide inovasi dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang akan dilaksanakan dan juga bekerja sama dengan lembaga/instansi yang ahli dalam inovasi untuk melakukan penilaian inovasi yang dilaksanakan Organisasi Perangkat daerah (OPD), Adapun inovasi yang dilakukan dan dilombakan dari masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

No	Nama OPD	Judul Inovasi
1	Dinas Pertanian	SIPELUNAK (Integrasi Pelaku Usaha Peternakan)
	Dinas Pertanian	PERI SABUN ANDALAN (Perawatan Induk Sapi Bunting dan Anak Dua Bulan)
	Dinas Pertanian	Biogas Enter Kopi (Biogas Energi Terbarukan Kotoran Sapi)
	Dinas Pertanian	MIRA KANSIL (Mini Ranch Tingkatkan Hasil)
2	Kecamatan Babulu	Antar Jemput Ijin (AJI)
	Kecamatan Babulu	Sahabat Bumdes
	Kecamatan Babulu	Kecamatan Membangun Embung Petani Sejahtera (Kembang Paser)
	Kecamatan Babulu	Aplikasi Babulu Tangguh
3	Dinas Sosial	Cintaku di rumah singgah
	Dinas Sosial	Stiker Harga diri

No	Nama OPD	Judul Inovasi
	Dinas Sosial	DINSOS CERDAS (cerita di rumah singgah)
4	Dinas Lingkungan Hidup	LAYANAN SETIA (Sedot Tinja Anda)
	Dinas Lingkungan Hidup	SERBU GASS (Seratus Bank Sampah Unit Dan Gerakan Sedekah Sampah)
5	DP3AP2KB	Percepatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Desa Gender dan Anak (CETAR PUAN DESGENAK)
	DP3AP2KB	Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Desa (Kilan Puan Lekdes)
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	CAKEP PPU (Cara asik kenali pariwisata Penajam Paser Utara)
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	SOSIS KEKINIAN
7	Dinas kukmperindag	Pembuatan website one stop service secara online dinas kukmperindag
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Youtube Edukasi Story (YUCAS)
9	SATPOL PP	(Siap Kerja Cepat Di Kala Warga Darurat
10	Inspektorat Daerah	KosT-@N APIP Mobile
11	DISDUKCAPIL	LAYANAN ONLINE ADMINDUK APLIKASI GO PPU
12	Sekretariat DPRD	Live Streaming Rapat-Rapat Paripurna

No	Nama OPD	Judul Inovasi
15	Disdikpora	KUUPAH PADI (Kunjungan Guru Pahlawan Pendidikan)

B. Penutup

Laporan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja serta alat untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan juga merupakan pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang implementasinya diwujudkan dalam bentuk Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2021.

Demikian Laporan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 ini disusun, semoga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan ini.


Pt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ir. H. HAMDAM